

# Rekonsepsi Definisi dan Teori Intelijen: Pendekatan Multidimensional untuk Menganalisis Kompleksitas Keamanan Nasional Modern

## Reconceptualizing the Definition and Theory of Intelligence: A Multidimensional Approach to Analyzing the Complexity of Modern National Security

Stanislaus Riyanta  
Universitas Indonesia  
Email: [stanislaus@ui.ac.id](mailto:stanislaus@ui.ac.id)

### Article Info

Received: May 6, 2025	Revised: July 18, 2025	Accepted: July 25, 2025	Published: July 31, 2025
--------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

**Abstract:** *Intelligence is a crucial element in maintaining national security, especially amidst the complexity of national security in the 21st century. This study offers a reconceptualization of the definition and theory of intelligence through a multidimensional approach that integrates normative philosophical perspectives, the concept of Expanded Intelligence Communities (EIC), and scientific methodology in intelligence analysis. The method used is qualitative with in-depth literature study, thus allowing the identification of conceptual differences and weaknesses of conventional intelligence approaches. The uniqueness of this study lies in the combination of academic and practical insights involving a philosophical framework for intelligence ethics, the expansion of the intelligence community across institutions and actors (government, private sector, academics), and the use of scientific methods (thematic and data analysis) in the intelligence process. The results of this reconception are expected to generate a new conceptual framework and practical policy recommendations. Practical contributions include guidance for policymakers and the intelligence community in dealing with contemporary threats such as terrorism and cybercrime more holistically. With this more inclusive and adaptive approach, the national*



*intelligence strategy is expected to remain relevant and effective to prevent future intelligence failures.*

**Keywords:** *intelligence, national security, expanded intelligence communities*

**Abstrak:** *Intelijen merupakan elemen krusial dalam menjaga keamanan nasional, terutama di tengah kompleksitas keamanan nasional di abad ke-21. Penelitian ini menawarkan rekonsepsi definisi dan teori intelijen melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan perspektif filsafat normatif, konsep Expanded Intelligence Communities (EIC), dan metodologi ilmiah dalam analisis intelijen. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan studi pustaka mendalam, sehingga memungkinkan identifikasi perbedaan konseptual dan kelemahan pendekatan intelijen konvensional. Keunikan studi ini terletak pada penggabungan wawasan akademis dan praktis yang melibatkan kerangka filosofis untuk etika intelijen, perluasan komunitas intelijen lintas lembaga dan aktor (pemerintah, swasta, akademisi), serta penggunaan metode ilmiah (analisis tematik dan data) dalam proses intelijen. Hasil rekonsepsi ini diharapkan menghasilkan kerangka konseptual baru dan rekomendasi kebijakan praktis. Kontribusi praktis meliputi panduan bagi pembuat kebijakan dan komunitas intelijen dalam menghadapi ancaman kontemporer seperti terorisme dan kejahatan siber secara lebih holistik. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif ini, strategi intelijen nasional diharapkan tetap relevan dan efektif untuk mencegah kegagalan intelijen di masa mendatang.*

**Kata kunci:** *intelijen, keamanan nasional, expanded intelligence communities*

## **Pendahuluan**

Intelijen merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga keamanan nasional suatu negara. Secara historis, intelijen telah terbukti menjadi salah satu fondasi utama keamanan nasional yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan strategis dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, intelijen tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Dari era ke era, pemahaman tentang intelijen telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan munculnya berbagai kompleksitas tantangan keamanan baru yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, ancaman terhadap keamanan nasional semakin kompleks dan beragam, mencakup terorisme, kejahatan siber, dan konflik antarnegara.

Sherman Kent, yang dikenal sebagai bapak intelijen modern, memberikan kontribusi besar dalam mendefinisikan intelijen. Menurut Kent, intelijen adalah pengetahuan yang diperlukan oleh pemimpin sipil dan militer untuk membuat keputusan yang tepat dalam menjaga keamanan negara. Definisi ini menekankan pentingnya analisis dan interpretasi informasi, bukan sekadar pengumpulan data. Kent juga menyoroti bahwa intelijen harus mampu memberikan wawasan mendalam tentang situasi yang dihadapi, termasuk potensi ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Dalam pandangannya, organisasi yang terstruktur dan proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi sangat penting untuk menghasilkan intelijen yang berkualitas.

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai ahli lain juga memberikan definisi dan perspektif yang berbeda mengenai intelijen. T.F. Troy, misalnya, mendefinisikan intelijen sebagai “pengetahuan tentang musuh” yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang kekuatan, kelemahan, dan niat musuh. Di sisi lain, D. Kahn juga mengemukakan bahwa intelijen dapat didefinisikan dalam konteks yang lebih luas sebagai informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi. Kahn menekankan bahwa intelijen harus relevan dan tepat waktu untuk dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks keamanan nasional, intelijen berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Scott dan Jackson menekankan bahwa intelijen melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Patrick F. Walsh menambahkan bahwa intelijen juga mencakup keamanan individu di dalam dan antar negara, sejalan dengan agenda keamanan manusia yang berkembang pada pertengahan 1990-an.

Tantangan yang dihadapi oleh intelijen tidak hanya berasal dari kompleksitas ancaman, tetapi juga dari dinamika global yang terus berubah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara informasi dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi, ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi terbatas pada invasi militer, tetapi juga mencakup terorisme transnasional, kejahatan siber, disinformasi, hingga pandemi. Sebagai contoh, laporan ancaman tahunan terbaru dari komunitas intelijen Amerika Serikat menyoroti ancaman siber serius oleh aktor negara maupun non-negara yang secara signifikan meningkat dan

menyerukan respons terpadu yang lebih kuat.<sup>1</sup> Data ini menunjukkan bahwa paradigma intelijen konvensional perlu diubah agar mampu menghadapi lanskap ancaman modern yang kompleks, asimetris, dan multidimensional. Dengan demikian, rekonsepsi definisi dan teori intelijen dalam keamanan nasional menjadi sangat penting. Pendekatan konvensional yang berfokus pada intelijen militer dan ancaman konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan modern yang bersifat multidimensional dan tidak terduga.

Naskah penelitian ini disusun berdasarkan pemikiran para ahli intelijen terdahulu sembari mengkritisi keterbatasannya. Kajian literatur menunjukkan bahwa selama puluhan tahun tidak terdapat konsensus tunggal tentang definisi intelijen. Walter Laqueur dan Michael Warner mengamati bahwa hingga awal abad ke-21 pun komunitas intelijen “belum memiliki definisi maupun teori intelijen yang disepakati bersama”.<sup>2</sup> Setiap penulis cenderung menawarkan definisi berbeda, yang jarang saling merujuk atau membangun satu sama lain. Implikasi dari hal ini adalah usaha merumuskan teori komprehensif menjadi terhambat karena para ahli berbeda pandangan tentang esensi intelijen itu sendiri. Beberapa model konseptual sebelumnya mencoba menjembatani kesenjangan tersebut seperti definisi intelijen herman Kent yang menekankan pengetahuan untuk pengambilan keputusan, hingga upaya redefinisi mutakhir oleh Alan Breakspear<sup>3</sup> dan Adewunmi Falode<sup>4</sup> yang bersifat lebih holistik.

Pendekatan-pendekatan terdahulu cenderung memiliki kelemahan spesifik, yaitu definisi klasik terlalu sempit pada lingkup militer/negara, sementara upaya redefinisi baru masih mencari elemen kunci apa saja yang harus dicakup. Falode<sup>5</sup> misalnya, berargumen bahwa definisi intelijen sebaiknya mencakup lima elemen utama: proses, data, informasi yang dapat ditindaklanjuti, aktor politik, dan keamanan. Hal ini sejalan dengan arah penelitian ini yang juga menekankan pentingnya multi-dimensi. Kesenjangan literatur yang ingin diatasi oleh penelitian

---

<sup>1</sup> U.S. Intelligence Community, Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community, (Washington, DC: Office of the Director of National Intelligence, 2025). <https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2025/4058-2025-annual-threat-assessment>

<sup>2</sup> Laqueur, Walter, *The Age of Terrorism*, (Boston: Little, Brown and Company, 1985).

<sup>3</sup> Alan Breakspear, “A New Definition of Intelligence,” *Intelligence and National Security*, (2012): 1-16. doi:10.1080/02684527.2012.699285

<sup>4</sup> Adewunmi Falode, “Found: A Definition of Intelligence,” *Journal of Social Sciences* IV, no. 1 (March 2021): 70.

<sup>5</sup> *Ibid.*

ini adalah belum adanya kerangka intelijen terpadu yang mencakup berbagai aspek berikut

- a. Multi-dimensional (mencakup aspek aktivitas, organisasi, dan pengetahuan sekaligus)
- b. Multi-aktor (melibatkan komunitas intelijen yang diperluas lintas sektor)
- c. Normatif-ilmiah (berbasis etik filosofis dan metode ilmiah)

Penelitian ini menitikberatkan kebaruan pada integrasi terhadap beberapa elemen yang belum disatukan dalam literatur intelijen sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan perspektif filsafat ke dalam intelijen – misalnya dengan mengadopsi kerangka normatif seperti *Just Intelligence Theory* (JIT) ala Seumas Miller dan mengevaluasi batas-batasnya dalam praktik intelijen. Pendekatan ini menyoroti dimensi etis dan epistemologis intelijen, yang selama ini kurang diakomodasi dalam teori klasik. Kedua, penelitian ini juga membahas konsep *Expanded Intelligence Communities* (EIC) yaitu perluasan komunitas intelijen dengan melibatkan aktor lintas disiplin dan lembaga di luar dinas intelijen tradisional. Integrasi EIC menandai pergeseran menuju kolaborasi yang lebih luas dengan melibatkan kalangan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi ancaman kompleks seperti terorisme dan siber secara holistik dan kolaboratif. Ketiga, penelitian ini juga menekankan metodologi ilmiah dalam analisis intelijen, termasuk penggunaan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif serta *foresight* (antisipasi ke depan) dan insight (pendalaman) berbasis data. Kombinasi unik filsafat, EIC, dan metodologi ilmiah inilah yang membedakan penelitian ini dari studi intelijen terdahulu.

Dengan demikian, posisi naskah penelitian ini dalam literatur adalah memperluas diskursus intelijen ke ranah yang lebih interdisipliner dan aplikatif, menjawab tantangan intelijen modern yang tidak tertampung oleh teori konvensional. Penelitian ini juga akan membahas secara lebih lanjut mengenai rekonsepsi definisi dan teori intelijen dalam konteks keamanan nasional sehingga dapat menghasilkan kerangka definisi dan teori yang lebih multidimensional, lengkap dengan perangkat konsep dan rekomendasi kebijakan praktis. Penekanan akan diberikan pada pentingnya integrasi berbagai perspektif, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik dan adaptif terhadap intelijen. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat strategi intelijen yang diadopsi oleh negara tetap relevan dan efektif

dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang terus berkembang di dunia modern.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*literature review*) secara holistik dan mendalam. Secara khusus, metode yang diterapkan merupakan kombinasi tinjauan pustaka sistematis dan analisis konten tematik atas sumber-sumber terpilih. Adapun langkah-langkah penelitian ini mencakup:

- 1) Sumber data primer dan sekunder yang dihimpun dari literatur akademik dan dokumen kebijakan terkait intelijen serta keamanan nasional. Sumber akademik mencakup jurnal bereputasi, buku teks intelijen, hingga artikel konferensi. Sumber kebijakan mencakup kerangka hukum dan doktrin intelijen. Adapun literatur penelitian seperti yang ditulis Sherman Kent, Michael Warne juga di kaji untuk landasan historis. Kriteria inklusi literatur didasarkan pada relevansi dengan definisi/teori intelijen dan kontemporer dengan prioritas publikasi terbitan terbaru untuk konteks modern.
- 2) Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Pertama, definisi-definisi intelijen dari berbagai sumber diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan. Dalam hal ini, teknik perbandingan digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antar definisi. Kedua, analisis kritis dilakukan terhadap teori-teori atau model intelijen terdahulu yaitu setiap model dievaluasi aspek kelebihan dan kelemahannya dalam menjawab kebutuhan intelijen masa kini. Proses ini menghasilkan kategorisasi dimensi intelijen (kegiatan, organisasi, pengetahuan) sebagaimana diuraikan dalam tinjauan literatur. Selain itu, kajian literatur difokuskan untuk menemukan celah teoritis (*theoretical gaps*) yang kemudian diisi oleh kerangka rekonsepsi yang peneliti usulkan. Misalnya, ditemukan gap bahwa tidak ada teori intelijen yang mengintegrasikan perspektif *human security*, sains, dan multi-aktor yang kemudian menjadi dasar rancangan konsep EIC dalam penelitian.
- 3) Peningkatan validitas konseptual dilakukan dengan membandingkan hasil sintesis konsep dengan pengalaman empiris atau studi kasus intelijen nyata. Studi kasus dipilih

untuk menguji apakah kerangka baru dapat menjelaskan keberhasilan atau kegagalan intelijen dalam kasus tertentu. Begitu pula, pandangan pakar intelijen, melalui publikasi, digunakan sebagai triangulasi seperti pendapat mantan direktur GCHQ Robert Hannigan tentang perlunya pendekatan *whole-of-society* dalam keamanan siber turut memperkaya justifikasi konsep EIC. Karena penelitian ini bersifat kualitatif-konseptual, validitasnya bertumpu pada kekayaan referensi dan konsistensi argumen lintas sumber.

## Pembahasan

### Definisi Intelijen

Pembahasan ilmiah terkait definisi intelijen tidak bisa dilepaskan dari sosok Sherman Kent, yang dikenal sebagai bapak intelijen modern. Kent<sup>6</sup>, mendefinisikan intelijen sebagai pengetahuan yang diperlukan oleh pemimpin sipil dan militer untuk membuat keputusan yang tepat dalam menjaga keamanan negara. Dalam pandangannya, intelijen bukan hanya sekadar pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Kent menekankan bahwa intelijen harus mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang situasi yang dihadapi, termasuk potensi ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Ia juga menggarisbawahi pentingnya organisasi yang terstruktur dalam menghasilkan intelijen yang berkualitas, serta proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi. Selain itu, Kent juga menyoroti pentingnya konteks dalam intelijen, di mana informasi harus dianalisis dan disajikan dengan cara yang relevan dan berguna bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan. Dalam pandangannya, intelijen harus mampu mengurangi ketidakpastian dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang kompleks, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Definisi intelijen menurut Sherman Kent menekankan pada proses yang terstruktur dan tujuan akhir dari intelijen sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

---

<sup>6</sup> Sherman Kent, *Strategic Intelligence for American World Policy*, (Princeton University Press, 1949). See also Sherman Kent. *Strategic Intelligence for the Twenty-First Century*. (Washington, D.C.: National Defense University Press, 1966).

Adapun Troy<sup>7</sup> mengemukakan bahwa definisi intelijen yang tepat adalah “pengetahuan tentang musuh.” Definisi ini menekankan bahwa intelijen tidak hanya sekadar informasi, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, dan niat musuh. Sementara menurut Kahn<sup>8</sup>, intelijen dapat didefinisikan dalam konteks yang luas sebagai informasi. Ia menekankan bahwa meskipun sulit untuk memberikan definisi yang tepat dan universal, intelijen berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya Kahn menyatakan bahwa intelijen adalah informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi. Ini mencakup pengumpulan data dari observasi, laporan, dan komunikasi yang dapat memberikan wawasan tentang situasi yang dihadapi. Kemudian Khan menjelaskan bahwa intelijen tidak hanya melibatkan pengumpulan informasi, tetapi juga proses analisis yang mendalam untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat digunakan. Kahn menekankan pentingnya analisis dalam mengidentifikasi pola dan tren yang dapat mempengaruhi keputusan strategis. Di sisi lain Kahn menyoroti bahwa intelijen harus relevan dan tepat waktu untuk dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan terkini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan dalam konteks keamanan nasional. Kahn juga mencatat bahwa pemahaman tentang intelijen harus mempertimbangkan konteks sejarah dan perkembangan yang telah membentuk praktik intelijen saat ini. Seiring dengan perubahan dalam teknologi dan dinamika global, definisi intelijen juga harus beradaptasi untuk mencerminkan realitas baru.

Scott dan Jackson<sup>9</sup> mengemukakan bahwa intelijen dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks keamanan nasional. Beberapa elemen kunci dari definisi intelijen yang diusulkan oleh Scott dan Jackson adalah sebagai berikut: pertama adalah proses pengumpulan: Intelijen melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi. Scott dan Jackson menekankan bahwa pengumpulan informasi ini harus dilakukan secara sistematis dan terencana untuk

---

<sup>7</sup> Thomas F Troy, “The “Correct” Definition of Intelligence,” *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 5, no. 4 (1991): 433-454. doi:10.1080/08850609108435193

<sup>8</sup> David Kahn, An Historical Theory of Intelligence,” *Intelligence and National Security*, 16, no. 3 (2001): 79-92. doi:10.1080/02684520412331306220

<sup>9</sup> Len Scott and Peter Jackson, “The Study of Intelligence in Theory and Practice,” *Intelligence and National Security*, 19, no. 2 (2004): 139-169. doi:10.1080/0268452042000302930

memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan relevan. Kedua adalah analisis, setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut untuk menghasilkan wawasan yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Scott dan Jackson menekankan bahwa analisis intelijen harus dilakukan dengan ketelitian dan keahlian untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi yang dihasilkan. Ketiga adalah penyajian, hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan atau briefing yang ditujukan kepada pengambil keputusan. Penyajian informasi yang jelas dan tepat waktu sangat penting agar dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Scott dan Jackson menekankan pentingnya penyajian informasi yang dapat dipahami oleh pengambil keputusan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Keempat adalah Relevansi untuk Keputusan Strategis. Intelijen tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul informasi, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan intelijen yang akurat dan tepat waktu dapat mengarah pada tindakan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan nasional.

Patrick F. Walsh<sup>10</sup> mendefinisikan intelijen sebagai informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan negara. Definisi ini mencakup tidak hanya pencegahan atau penuntutan perang antar negara, tetapi juga keamanan individu di dalam dan antar negara, yang sejalan dengan agenda keamanan manusia yang mulai berkembang pada pertengahan 1990-an. Walsh menekankan bahwa intelijen berfungsi untuk memberikan dukungan keputusan bagi mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan keamanan. Dalam hal ini, intelijen tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi rahasia, tetapi juga pada analisis dan penyampaian informasi yang relevan untuk membantu pengambil keputusan dalam mengelola risiko yang ada.<sup>11</sup> Pendapat lain oleh Breakspear<sup>12</sup> mendefinisikan intelijen sebagai kemampuan korporat (organisasi) untuk meramalkan perubahan tepat waktu untuk melakukan sesuatu tentangnya. Definisi ini menekankan bahwa intelijen bukan hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang kemampuan untuk menganalisis dan meramalkan perubahan yang mungkin terjadi, baik yang positif (peluang) maupun yang negatif (ancaman). Definisi tersebut juga mencakup dua komponen penting, yaitu foresight (kemampuan

---

<sup>10</sup> Patrick Walsh, *Intelligence and Intelligence Analysis*, (Routledge, 2011).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Alan Breakspear, "A New Definition of Intelligence," *Intelligence and National Security*, (2012): 1-16. doi:10.1080/02684527.2012.699285

untuk melihat ke depan) dan insight (pemahaman yang mendalam). Intelijen bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang akan datang, yang dapat memberikan keuntungan atau menghindari risiko. Selanjutnya Breakspear menekankan bahwa banyak definisi intelijen yang ada saat ini terlalu fokus pada ancaman, sehingga melewatkan peluang yang dapat dimanfaatkan. Dengan mengadopsi definisi yang lebih luas, para pengambil keputusan dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada.

Hank Prunckun<sup>13</sup> menyampaikan definisi lain yang menyebutkan bahwa Intelijen dapat didefinisikan sebagai proses dan tindakan yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, intelijen tidak hanya sekadar informasi, tetapi juga mencakup proses analisis yang mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Menurut Prunckun, intelijen dapat dipahami melalui empat makna utama:

1. **Tindakan atau proses yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan:** Ini mencakup semua langkah yang diambil untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi.
2. **Kumpulan pengetahuan yang dihasilkan:** Ini adalah hasil akhir dari proses intelijen yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan.
3. **Organisasi yang berurusan dengan pengetahuan:** Ini merujuk pada lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis intelijen, seperti badan intelijen pemerintah.
4. **Laporan dan briefing yang dihasilkan untuk pengambil keputusan:** Ini adalah produk akhir dari proses intelijen yang disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Prunckun menekankan bahwa intelijen beroperasi dalam konteks kerahasiaan, yang membedakannya dari bentuk penelitian lainnya. Dalam hal ini, intelijen tidak hanya berfungsi untuk memprediksi masa depan, tetapi juga sebagai ilmu yang didasarkan pada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang solid. Dengan demikian, intelijen bertujuan

---

<sup>13</sup> Hank Prunckun, *Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, (Rowman & Littlefield, 2014).

untuk memberikan solusi atau opsi kepada pengambil keputusan berdasarkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi intelijen lainnya disampaikan oleh Jeffrey P. Rogg<sup>14</sup>, yaitu intelijen sebagai suatu usaha yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks keamanan nasional. Rogg menekankan bahwa intelijen tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan negara. Rogg juga menggarisbawahi bahwa definisi intelijen sering kali dipengaruhi oleh konteks dan tujuan dari penggunaannya. Ia mencatat bahwa ada perbedaan antara “teori intelijen untuk akademisi” yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan intelijen kepada publik, dan “teori untuk intelijen” yang lebih langsung berkaitan dengan kebutuhan praktisi di lapangan. Dengan demikian, pemahaman tentang intelijen harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Pili<sup>15</sup> mengemukakan bahwa intelijen adalah istilah yang kompleks dan sering kali sulit untuk didefinisikan secara universal. Ia mencatat bahwa tidak ada kesepakatan umum di antara para akademisi dan praktisi mengenai definisi intelijen. Beberapa elemen kunci dari definisi intelijen yang diusulkan oleh Pili adalah sebagai berikut:

1. **Keterbatasan Definisi:** Pili menekankan bahwa banyak definisi intelijen yang ada saat ini bersifat deskriptif dan tidak mencakup semua aspek yang relevan. Misalnya, definisi yang menyatakan bahwa “intelijen adalah informasi yang dikumpulkan untuk memahami atau mempengaruhi entitas asing” terlalu sempit dan tidak mencakup fungsi intelijen yang lebih luas dalam konteks keamanan nasional.
2. **Proses Epistemik:** Pili mengusulkan bahwa intelijen harus dipahami sebagai proses epistemik yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi. Proses ini dimulai dengan permintaan dari pengambil keputusan dan

---

<sup>14</sup> Jeffrey P. Rogg ‘Quo Vadis?’ A comparatist meets a theorist searching for a grand theory of intelligence. *Intelligence and National Security*, 33, no.4 (2018): 541-552. doi:10.1080/02684527.2018.1452575

<sup>15</sup> Giangiuseppe Pili, “Toward a Philosophical Definition of Intelligence,” *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, 21, no. 2 (2019): 162-190. doi:10.1080/23800992.2019.1649113

berakhir dengan pengetahuan dan pemahaman tentang niat dan perilaku musuh untuk menghindari kejutan dan mendukung keputusan yang rasional.

3. **Fungsi dan Tujuan:** Definisi intelijen juga harus mencakup fungsi dan tujuan yang lebih luas. Pili mencatat bahwa intelijen tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang dapat membantu pengambil keputusan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif.
4. **Ketidakjelasan dan Kompleksitas:** Pili mengakui bahwa istilah “intelijen” itu sendiri adalah kata yang tidak jelas (samar) dan memiliki berbagai makna. Ia berargumen bahwa pemahaman tentang intelijen harus mempertimbangkan kompleksitas dan nuansa yang terlibat dalam praktik intelijen, serta bagaimana istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda.

Pendapat lain disampaikan oleh Seumas Miller<sup>16</sup> yang menyebutkan bahwa intelijen adalah informasi yang diperoleh, dianalisis, dan disebarluaskan oleh lembaga-lembaga intelijen untuk tujuan keamanan nasional. Miller menjelaskan bahwa intelijen dapat merujuk pada kemampuan individu untuk mengumpulkan informasi, tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, atau produk dari tindakan tersebut, yaitu informasi yang telah dikumpulkan. Miller juga menekankan bahwa definisi intelijen sering kali bersifat problematik karena melibatkan berbagai konteks, termasuk keadilan kriminal dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, intelijen tidak hanya dianggap sebagai informasi yang benar, tetapi juga sebagai informasi yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara. Lebih lanjut, Miller menyatakan bahwa intelijen harus dipahami dalam kerangka tujuan institusional, dimana informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan keamanan nasional yang lebih besar, seperti melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal.

---

<sup>16</sup>Seumas Miller, “Rethinking the Just Intelligence Theory of National Security Intelligence Collection and Analysis: The Principles of Discrimination, Necessity, Proportionality and Reciprocity,” *Social Epistemology*, 35, no. 3 (2021): 211-231. doi:10.1080/02691728.2020.1855484

Tabel 1: Ringkasan Definisi Intelijen oleh Beberapa Ahli

No	Nama dan Tahun	Definisi Intelijen
1	Sherman Kent <sup>17</sup>	produk dari pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan
2	T.F. Troy <sup>18</sup>	pengetahuan tentang musuh, mencakup pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, dan niat musuh.
3	D. Kahn <sup>19</sup>	informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi, yang mencakup pengumpulan data dari observasi, laporan, dan komunikasi yang dapat memberikan wawasan tentang situasi yang dihadapi.
4	Scott & Jackson <sup>20</sup>	proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks keamanan nasional
5	Patrick F. Walsh <sup>21</sup>	informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan negara
6	A Breakspear <sup>22</sup>	kemampuan korporat (organisasi) untuk meramalkan perubahan tepat waktu untuk melakukan sesuatu tentangnya
7	Hank Prunckun <sup>23</sup>	proses dan tindakan yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi pengambilan keputusan
8	Jeffrey P. Rogg <sup>24</sup>	suatu usaha yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks keamanan nasional

<sup>17</sup> Sherman Kent. *Strategic Intelligence for the Twenty-First Century*. (Washington, D.C.: National Defense University Press, 1966).

<sup>18</sup> Thomas F Troy, "The "Correct" Definition of Intelligence," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 5, no. 4 (1991): 433-454. doi:10.1080/08850609108435193

<sup>19</sup> David Kahn, An Historical Theory of Intelligence," *Intelligence and National Security*, 16, no. 3 (2001): 79-92. doi:10.1080/02684520412331306220

<sup>20</sup> en Scott and Peter Jackson, "The Study of Intelligence in Theory and Practice," *Intelligence and National Security*, 19, no. 2 (2004): 139-169. doi:10.1080/0268452042000302930

<sup>21</sup> atrick Walsh, *Intelligence and Intelligence Analysis*, (Routledge, 2011)

<sup>22</sup> Alan reakspear, "A New Definition of Intelligence," *Intelligence and National Security*, (2012): 1-16. doi:10.1080/02684527.2012.699285

<sup>23</sup> Hank Prunckun, *Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, (Rowman & Littlefield, 2014).

<sup>24</sup> Jeffrey P. Rogg 'Quo Vadis?' A comparatist meets a theorist searching for a grand theory of intelligence. *Intelligence and National Security*, 33, no.4 (2018): 541-552. doi: 10.1080/02684527.2018.1452575

No	Nama dan Tahun	Definisi Intelijen
9	G Pili <sup>25</sup>	proses epistemik yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi
10	Seumas Miller <sup>26</sup>	informasi yang diperoleh, dianalisis, dan disebarluaskan oleh lembaga-lembaga intelijen untuk tujuan keamanan nasional

Perbedaan sudut pandang, atau bahkan kepentingan, menjadikan intelijen kaya akan definisi. Namun dari berbagai cendekiawan yang menyajikan definisi intelijen dapat ditarik berbagai kata kunci seperti yang diusulkan oleh Sherman Kent<sup>27</sup>, yaitu intelijen sebagai pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menjaga keamanan negara; Troy<sup>28</sup> intelijen adalah pengetahuan tentang musuh; Kahn<sup>29</sup> intelijen sebagai informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber; Scott dan Jackson<sup>30</sup> intelijen sebagai proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks keamanan nasional; Prunckun<sup>31</sup> intelijen adalah proses dan tindakan yang menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi pengambilan keputusan.

Selain itu juga yang disampaikan beberapa catatan terkait definisi intelijen seperti oleh Walsh<sup>32</sup> menambahkan bahwa intelijen juga mencakup keamanan individu dan bukan hanya pencegahan perang

<sup>25</sup> Giangiuseppe Pili, "Toward a Philosophical Definition of Intelligence," *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, 21, no. 2 (2019): 162-190. doi:10.1080/23800992.2019.1649113

<sup>26</sup> Seumas Miller, "Rethinking the Just Intelligence Theory of National Security Intelligence Collection and Analysis: The Principles of Discrimination, Necessity, Proportionality and Reciprocity," *Social Epistemology*, 35, no. 3 (2021): 211-231. doi:10.1080/02691728.2020.1855484

<sup>27</sup> Sherman Kent, *Strategic Intelligence for American World Policy*, (Princeton University Press, 1949). See also Sherman Kent. *Strategic Intelligence for the Twenty-First Century*. (Washington, D.C.: National Defense University Press, 1966).

<sup>28</sup> Thomas F Troy, "The "Correct" Definition of Intelligence," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 5, no. 4 (1991): 433-454. doi:10.1080/08850609108435193

<sup>29</sup> David Kahn, "An Historical Theory of Intelligence," *Intelligence and National Security*, 16, no. 3 (2001): 79-92. doi:10.1080/02684520412331306220

<sup>30</sup> Len Scott and Peter Jackson, "The Study of Intelligence in Theory and Practice," *Intelligence and National Security*, 19, no. 2 (2004): 139-169. doi:10.1080/0268452042000302930

<sup>31</sup> Hank Prunckun, *Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, (Rowman & Littlefield, 2014).

<sup>32</sup> Patrick Walsh, *Intelligence and Intelligence Analysis*, (Routledge, 2011)

antar negara; Breakspear<sup>33</sup> yang menyoroti bahwa intelijen harus mampu meramalkan perubahan dan mengidentifikasi peluang serta ancaman; Rogg<sup>34</sup> menekankan bahwa intelijen tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang dikumpulkan, tetapi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Pili<sup>35</sup> mengakui kompleksitas istilah intelijen dan menekankan bahwa definisi harus mencakup fungsi dan tujuan yang lebih luas; dan Miller<sup>36</sup> yang menekankan bahwa intelijen harus relevan dengan tujuan keamanan nasional yang lebih besar

Dari berbagai sumber tersebut maka dapat disimpulkan bahwa intelijen dalam konteks sebuah aktifitas tidak dapat dilepaskan dari proses pengumpulan data, analisis, dan penyajian informasi. Dalam konteks organisasi (negara) maka intelijen tidak bisa dilepaskan dari fungsi untuk memahami informasi terkait musuh, atau memahami ancaman-ancaman, dan melakukan upaya untuk pencegahannya. Selanjutnya dalam konteks sebuah produk, intelijen adalah sebuah data yang telah dianalisis menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Untuk untuk dalam mendefinisikan intelijen tidak bisa dilepaskan dari tiga konteks yaitu intelijen sebagai aktifitas, intelijen sebagai organisasi dan intelijen sebagai produk.

Definisi intelijen dalam keamanan nasional akhirnya dapat disimpulkan dalam tiga konteks yaitu:

- Konteks kegiatan: intelijen adalah sebuah aktifitas mengumpulkan data, menganalisis menjadi informasi, dan menyajikannya kepada pengguna untuk menjadi pendukung pengambilan keputusan dalam mencegah ancaman terhadap negara.
- Konteks organisasi: intelijen adalah alat negara yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mendeteksi, memberikan peringatan, dan mencegah ancaman terhadap negara.

---

<sup>33</sup> Alan reakspear, "A New Definition of Intelligence," *Intelligence and National Security*, (2012): 1-16. doi:10.1080/02684527.2012.699285

<sup>34</sup> Jeffrey P. Rogg 'Quo Vadis?' A comparatist meets a theorist searching for a grand theory of intelligence. *Intelligence and National Security*, 33, no.4 (2018): 541-552. doi:10.1080/02684527.2018.1452575

<sup>35</sup> Giangiuseppe Pili, "Toward a Philosophical Definition of Intelligence," *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, 21, no. 2 (2019): 162-190. doi:10.1080/23800992.2019.1649113

<sup>36</sup> Seumas Miller, "Rethinking the Just Intelligence Theory of National Security Intelligence Collection and Analysis: The Principles of Discrimination, Necessity, Proportionality and Reciprocity," *Social Epistemology*, 35, no. 3 (2021): 211-231. doi:10.1080/02691728.2020.1855484

- Konteks pengetahuan: intelijen adalah data yang sudah dianalisis menjadi informasi, yang digunakan oleh pengambil keputusan dalam mencegah ancaman terhadap negara.

## Teori Intelijen

Perdebatan terkait teori intelijen hingga saat ini belum menemukan titik temu, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa intelijen berkembang sangat pesat dalam berbagai perspektif, sehingga penyatuan menjadi suatu teori yang diterima oleh semua pihak akan cukup sulit dilakukan. Namun, ada beberapa cendekiawan yang telah mengurai pemikirannya dalam mewujudkan teori intelijen.

Intelijen mempunyai hubungan dengan teori kejutan. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Wirtz yang menjelaskan mengapa kejutan menjadi elemen penting dalam strategi militer. Kejutan dapat berfungsi sebagai pengganda kekuatan, memungkinkan pihak yang lebih lemah untuk mencapai tujuan yang biasanya di luar jangkauan mereka.<sup>37</sup> Namun dalam konteks teori kejutan, Handel memberikan catatan bahwa kejutan juga membawa risiko, karena sering kali pihak yang melakukan serangan kejutan tidak dapat mempertahankan keuntungan yang diperoleh.<sup>38</sup> Teori tentang kegagalan intelijen menjadi kajian ilmiah yang cukup serius. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Richard Betts, dengan argumen bahwa kegagalan intelijen sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh para pemimpin, bukan hanya oleh kelemahan dalam sistem pengumpulan informasi. Betts menjelaskan bahwa kegagalan intelijen ini dapat terjadi karena adanya prasangka politik, kesibukan, atau ketidakmampuan untuk menerima informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan yang ada.<sup>39</sup>

Marrin mengadopsi kerangka kerja Geoffrey Vickers untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam konteks intelijen. Vickers menggambarkan analisis intelijen sebagai “anjing penjaga di rantai” yang dapat memberikan peringatan tetapi tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Keputusan akhir tetap berada di tangan pembuat

---

<sup>37</sup> James J Wirtz, “Theory of Surprise,” in *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phythian, (Routledge, 2009), 73-86.

<sup>38</sup> Michael Handel, “Intelligence and the Problem of Strategic Surprise,” *The Journal of Strategic Studies*, 7, no. 3 (1984): 229-230.

<sup>39</sup> Richard K. Betts, “Analysis, War, and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable,” *World Politics*, 31, no. 1 (1978): 61-89.

kebijakan.<sup>40</sup> Semetara itu, Mearsheimer menyebutkan bahwa intelijen diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dalam sistem internasional yang “tanpa aturan”. Negara-negara berinvestasi dalam intelijen untuk melindungi dan memperluas keuntungan relatif mereka.<sup>41</sup> Selanjutnya Phythian menyebutkan bahwa intelijen berfungsi sebagai alat untuk memberikan peringatan dini tentang ancaman yang mungkin muncul, sehingga negara dapat mengambil tindakan preventif.<sup>42</sup>

Pendekatan teori intelijen dengan filsafat dilakukan oleh Jules J. S. Gaspard dan Giangiuseppe Pili, yang menekankan pentingnya mengintegrasikan teori intelijen dengan filsafat untuk memperkaya pemahaman dan pengembangan teori dalam studi intelijen. Gaspard dan Pili mencatat bahwa studi intelijen tidak memiliki cabang filsafat yang jelas, berbeda dengan bidang-bidang tradisional seperti filsafat hukum atau filsafat sains. Hal ini menyebabkan banyak asumsi dasar dalam teori intelijen tidak dipertanyakan dan tetap tidak teruji. Integrasi antara intelijen dengan filsafat ini diharapkan dapat memperkaya eksplorasi ruang konseptual dan empiris dalam studi intelijen. Filsafat dapat memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk memahami tujuan, dasar, dan implikasi dari intelijen sebagai fenomena.<sup>43</sup> Adapun Gaspard dan Pili juga menyoroti adanya skeptisisme terhadap teori dalam studi intelijen, yang sering kali menganggap bahwa pendekatan empiris lebih penting daripada pendekatan teoritis. Mereka berargumen bahwa semua sistem simbolik, termasuk matematika dan bahasa, tidak bebas dari asumsi filosofis. Mereka mengutip Bertrand Russell yang menyatakan bahwa banyak orang yang terpengaruh oleh pandangan praktis cenderung meremehkan nilai filsafat, menganggapnya sebagai hal yang tidak berguna.<sup>44</sup> Selanjutnya, Gaspard dan Pili menyebutkan bahwa filsafat dapat membantu dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan eksistensi, pengetahuan, nilai, dan bahasa, yang merupakan inti dari teori intelijen. Misalnya, pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan “intelijen” dan

---

<sup>40</sup> Stephen Marrin, “Intelligence Analysis Theory: Explaining and Predicting Analytic Responsibilities,” *Intelligence and National Security*, 22, no. 6 (2007): 821-846. doi:10.1080/02684520701770634

<sup>41</sup> John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (W. W. Norton, 2001).

<sup>42</sup> Mark Phythian, “Intelligence Theory and Theories of International Relations: Shared World or Separate Worlds?” in *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phythian, (Routledge, 2009), 54-73.

<sup>43</sup> Jules J. S. Gaspard and Giangiuseppe Pili, “Integrating intelligence theory with philosophy: introduction to the special issue,” *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 763-776. doi:10.1080/02684527.2022.2076327

<sup>44</sup> *Ibid.*

bagaimana kita dapat mengukurnya. Dalam konteks ini, Gaspard dan Pili mengusulkan bahwa studi intelijen harus melibatkan pemikiran filosofis untuk menghindari kesalahan yang dapat dihindari dan untuk memperdalam pemahaman kita tentang intelijen.<sup>45</sup> Lebih lanjut, Gaspard dan Pili menyimpulkan bahwa teori intelijen dengan filsafat bukan hanya penting untuk pengembangan akademis, tetapi juga untuk praktik intelijen itu sendiri. Dengan mengakui dan mengintegrasikan perspektif filosofis, studi intelijen dapat berkembang menjadi disiplin yang lebih holistik dan komprehensif. Gaspard dan Pili menekankan bahwa filsafat harus menjadi inti dari teori intelijen, menciptakan cabang baru yang disebut “filsafat intelijen” (PHILINT) untuk memperluas pemahaman kita tentang intelijen sebagai pengetahuan, organisasi, dan aktivitas.<sup>46</sup>

Terry C. Quist, salah satu penulis melihat intelijen dari perspektif filsafat, berargumen bahwa meskipun tidak ada satu “filsafat intelijen” yang tunggal, penerapan filsafat sangat penting untuk memahami apa itu intelijen, mengapa kita mengejar intelijen, dan batasan-batasan yang ada dalam harapan terhadap intelijen. Filsafat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang nyata, apa yang benar, dan apa yang baik dalam konteks intelijen.<sup>47</sup> Quist juga menyoroti pentingnya pemikiran normatif dalam analisis intelijen. Norm-norm ini membantu para profesional intelijen untuk menentukan apa yang penting dan apa yang tidak. Dalam konteks ini, pemahaman tentang etika dan moralitas menjadi sangat penting, terutama ketika mempertimbangkan hubungan antara analisis intelijen dan pemerintah, publik, serta subjek penelitian manusia.<sup>48</sup> Lebih lanjut, Quist juga menyinggung perdebatan antara Sherman Kent dan Willmoore Kendall mengenai pendekatan yang tepat untuk analisis intelijen. Kent berpendapat bahwa analisis intelijen harus bersifat objektif dan berbasis pada data, sementara Kendall menekankan perlunya keterlibatan kreatif analisis dalam proses pembuatan kebijakan. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan empiris dan normatif dalam analisis intelijen.<sup>49</sup>

Seumas Miller mengusulkan tentang Just Intelligence Theory (JIT), yang merupakan pendekatan normatif yang digunakan untuk menganalisis aktivitas intelijen dalam konteks keamanan nasional. JIT diambil dari Just War Theory (JWT) dan berfungsi untuk memberikan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Terry C. Quist, “What philosophy can do for intelligence,” *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 777-790. doi:10.1080/02684527.2022.2076328

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

panduan etis dalam pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi intelijen. Meskipun JIT memberikan wawasan awal yang berguna, terdapat beberapa kekurangan yang signifikan yang membuatnya tidak layak sebagai teori normatif umum untuk aktivitas intelijensi.<sup>50</sup> Miller turut menyebutkan bahwa aktivitas intelijen nasional pada dasarnya adalah aktivitas epistemik, yang berfokus pada pengumpulan pengetahuan dan informasi. Hal ini berbeda dengan aktivitas perang yang bersifat kinetik. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang berlaku dalam JIT, seperti prinsip diskriminasi dan kebutuhan, diterapkan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan prinsip-prinsip dalam JWT. Misalnya, prinsip terakhir (last resort) yang berlaku dalam konteks perang tidak dapat diterapkan secara langsung pada aktivitas intelijen, yang seharusnya menjadi langkah pertama dalam pengambilan keputusan terkait keamanan nasional.<sup>51</sup>

Paradigma baru terkait intelijen diusulkan oleh Bernabé Aldeguer Cerdá dan Joan Antón-Mellón. Hal tersebut muncul karena intelijen sering kali berfokus pada aspek-aspek militer dan keamanan fisik. Namun, dengan munculnya tantangan baru seperti terorisme, cybercrime, dan perubahan iklim, paradigma ini perlu diperbarui. Aldeguer Cerdá dan Antón-Mellón menekankan bahwa paradigma lama intelijen dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan preventif yang melibatkan berbagai aktor dari disiplin ilmu sosial.<sup>52</sup> Bernabé Aldeguer Cerdá dan Joan Antón-Mellón mengusulkan konsep Expanded Intelligence Communities (EIC), atau komunitas intelijen yang diperluas. EIC mengintegrasikan berbagai perspektif dan metodologi dari ilmu politik, akademisi, dan lembaga non-pemerintah untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Menurut Aldeguer Cerdá dan Antón-Mellón EIC dapat membantu dalam memahami dan mengatasi ancaman ini dengan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif.<sup>53</sup> Menurut Bernabé Aldeguer Cerdá dan Joan Antón-Mellón, teori intelijen juga menekankan pentingnya metodologi ilmiah dalam analisis. Penggunaan

---

<sup>50</sup> Seumas Miller, "National Security Intelligence Activity and the Just Intelligence Theory," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* (2024). doi:10.1080/08850607.2024.2374227

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Bernabé Aldeguer Cerdá and Joan Antón-Mellón, "Intelligence Theory and Democratic Governance: An Epistemological Approach from Political Science," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 38, no. 2 (2025): 383-403. doi:10.1080/08850607.2023.2299016

<sup>53</sup> *Ibid.*

teknik-teknik analisis yang tepat, baik kualitatif maupun kuantitatif, sangat penting untuk menghasilkan intelijen yang akurat dan relevan. Mereka mencatat bahwa jika analisis tidak tahu bagaimana menggunakan metodologi ilmu sosial secara efektif, analisis mereka bisa menjadi tidak akurat.<sup>54</sup>

Dari berbagai teori tersebut di atas dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2: Rangkuman Pendapat para ahli tentang teori intelijen**

No	Nama dan Tahun	Pendapat tentang teori intelijen
1	Wirtz & Handel <sup>55</sup>	Kejutan sebagai elemen penting dalam strategi militer; kejutan dapat berfungsi sebagai pengganda kekuatan, memungkinkan pihak yang lebih lemah mencapai tujuan yang biasanya di luar jangkauan mereka. Teori kejutan juga membawa risiko; pihak yang melakukan serangan kejutan sering kali tidak dapat mempertahankan keuntungan yang diperoleh.
2	Richard Betts <sup>56</sup>	Kegagalan intelijen sering disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin, bukan hanya kelemahan dalam sistem pengumpulan informasi; kegagalan ini dapat terjadi karena prasangka politik dan ketidakmampuan untuk menerima informasi.
3	Marrin <sup>57</sup>	Mengadopsi kerangka kerja Geoffrey Vickers; analisis intelijen sebagai "anjing penjaga di rantai" yang memberikan peringatan tetapi tidak dapat mengambil tindakan sendiri.
4	Mearsheimer <sup>58</sup>	Intelijen diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dalam sistem internasional yang "tanpa aturan"; negara-negara berinvestasi dalam intelijen untuk melindungi dan memperluas keuntungan relatif mereka.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> James J Wirtz, "Theory of Surprise," in *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phythian, (Routledge, 2009), 73-86.

<sup>56</sup> Richard K. Betts, "Analysis, War, and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable," *World Politics*, 31, no. 1 (1978): 61-89.

<sup>57</sup> Stephen Marrin, "Intelligence Analysis Theory: Explaining and Predicting Analytic Responsibilities," *Intelligence and National Security*, 22, no. 6 (2007): 821-846. doi:10.1080/02684520701770634

<sup>58</sup> John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (W. W. Norton, 2001).

No	Nama dan Tahun	Pendapat tentang teori intelijen
5	Phythian <sup>59</sup>	Intelijen berfungsi sebagai alat untuk memberikan peringatan dini tentang ancaman yang mungkin muncul, sehingga negara dapat mengambil tindakan preventif.
6	Gaspard & Pili <sup>60</sup>	Pentingnya mengintegrasikan teori intelijen dengan filsafat untuk memperkaya pemahaman dan pengembangan teori dalam studi intelijen; filsafat dapat memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk memahami tujuan dan implikasi dari intelijen. Filsafat membantu merumuskan pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan bahasa yang merupakan inti dari teori intelijen.
7	Quist <sup>61</sup>	Penerapan filsafat penting untuk memahami apa itu intelijen, mengapa kita mengejar intelijen, dan batasan-batasan yang ada dalam harapan terhadap intelijen; pentingnya pemikiran normatif dalam analisis intelijen.
8	Miller <sup>62</sup>	Just Intelligence Theory (JIT) sebagai pendekatan normatif untuk menganalisis aktivitas intelijen; aktivitas intelijen adalah aktivitas epistemik yang berfokus pada pengumpulan pengetahuan dan informasi.
9	Aldeguer Cerdá & Antón-Mellón <sup>63</sup>	Paradigma baru dalam intelijen yang lebih proaktif dan preventif; konsep Expanded Intelligence Communities (EIC) untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dengan pendekatan holistik dan kolaboratif. Pentingnya metodologi ilmiah dalam analisis intelijen; penggunaan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan intelijen yang akurat dan relevan.

<sup>59</sup> Mark Phythian, "Intelligence Theory and Theories of International Relations: Shared World or Separate Worlds?" in *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phythian, (Routledge, 2009), 54-73.

<sup>60</sup> Jules J. S. Gaspard and Giangiuseppe Pili, "Integrating intelligence theory with philosophy: introduction to the special issue," *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 763-776.

<sup>61</sup> Terry C. Quist, "What philosophy can do for intelligence," *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 777-790. doi:10.1080/02684527.2022.2076328

<sup>62</sup> Seumas Miller, "National Security Intelligence Activity and the Just Intelligence Theory," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* (2024). doi:10.1080/08850607.2024.2374227

<sup>63</sup> Bernabé Aldeguer Cerdá and Joan Antón-Mellón, "Intelligence Theory and

Perdebatan terkait teori intelijen menunjukkan bahwa bidang ini masih berlangsung dan belum mencapai konsensus. Intelijen sebagai disiplin ilmu terus berkembang dengan berbagai perspektif yang diusulkan oleh para cendekiawan. Salah satu tema utama yang muncul adalah hubungan antara intelijen dan teori kejutan, di mana kejutan dapat menjadi alat strategis yang efektif, tetapi juga membawa risiko. Richard Betts menyoroti bahwa kegagalan intelijen sering kali disebabkan oleh kesalahan pengambilan keputusan oleh pemimpin, bukan hanya kelemahan dalam sistem pengumpulan informasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman konteks dan keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan.

Marrin dan Mearsheimer menekankan bahwa intelijen berfungsi untuk mengatasi ketidakpastian dalam sistem internasional dan memberikan peringatan dini tentang ancaman. Pendekatan yang lebih filosofis terhadap intelijen diusulkan oleh Gaspard dan Pili, yang mengintegrasikan filsafat untuk memperkaya pemahaman tentang intelijen. Mereka berargumen bahwa studi intelijen harus melibatkan pemikiran filosofis untuk menghindari asumsi yang tidak teruji dan memperdalam pemahaman kita tentang fenomena ini.

Terry C. Quist menambahkan bahwa pemikiran normatif dalam analisis intelijen sangat penting, terutama dalam konteks etika dan moralitas. Perdebatan antara pendekatan objektif dan kreatif dalam analisis intelijen juga mencerminkan ketegangan antara empiris dan normatif. Seumas Miller mengusulkan Just Intelligence Theory (JIT) sebagai pendekatan normatif untuk menganalisis aktivitas intelijen, meskipun ia mengakui adanya kekurangan dalam penerapannya.

Paradigma baru dalam intelijen diusulkan oleh Aldeguer Cerdá dan Antón-Mellón, yang menekankan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan modern seperti terorisme dan cybercrime. Mereka memperkenalkan konsep Expanded Intelligence Communities (EIC) yang mengintegrasikan berbagai perspektif dan metodologi untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Penekanan pada metodologi ilmiah dalam analisis intelijen juga menjadi sorotan, di mana penggunaan teknik analisis yang tepat sangat penting untuk menghasilkan intelijen yang akurat.

Teori intelijen adalah bidang yang kompleks dan multidimensional, di mana berbagai pendekatan dan perspektif saling melengkapi. Integrasi

---

Democratic Governance: An Epistemological Approach from Political Science," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 38, no. 2 (2025): 383-403. doi:10.1080/08850607.2023.2299016

antara teori, praktik, dan filsafat diharapkan dapat memperkaya studi intelijen dan menjadikannya disiplin yang lebih holistik. Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang intelijen dapat dicapai, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan terkait keamanan nasional dan strategi intelijen.

## Rekonsepsi

Rekonsepsi definisi dan teori intelijen dalam keamanan nasional diperlukan karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan perubahan lanskap ancaman, kompleksitas interaksi global, dan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas strategi keamanan. Berikut adalah beberapa alasan utama:

### 1. Dinamika Ancaman yang Berubah

Ancaman terhadap keamanan nasional kini lebih beragam dan kompleks, mencakup terorisme, kejahatan siber, dan ancaman dari negara-negara yang bersaing. Pendekatan tradisional yang berfokus pada intelijen militer dan ancaman konvensional tidak lagi memadai. Menurut Aldeguer Cerdá dan Antón-Mellón,<sup>64</sup> paradigma intelijen yang ada perlu diperbarui untuk mengatasi tantangan modern yang bersifat multidimensional dan tidak terduga.

### 2. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara informasi dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan. Intelijen kini harus beradaptasi dengan penggunaan big data, analisis data besar, dan kecerdasan buatan. Gaspard dan Pili<sup>65</sup> menekankan bahwa integrasi teknologi baru dalam teori intelijen sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan relevansi analisis intelijen.

### 3. Keterlibatan Berbagai Aktor

Keamanan nasional tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata; berbagai aktor, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, kini berperan dalam pengumpulan dan analisis intelijen. Konsep Komunitas

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Jules J. S. Gaspard and Giangiuseppe Pili, "Integrating intelligence theory with philosophy: introduction to the special issue," *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 763-776. doi:10.1080/02684527.2022.2076327

Intelijen yang Diperluas (Expanded Intelligence Communities) yang diusulkan oleh Aldeguer Cerdá dan Antón-Mellón<sup>66</sup> menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dan aktor untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

#### 4. Kebutuhan untuk Pendekatan Holistik

Rekonsepsi teori intelijen juga diperlukan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami intelijen sebagai fenomena sosial dan politik. Hal ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai etika dan normatif yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks intelijen. Quist<sup>67</sup> menunjukkan bahwa pemikiran normatif dalam analisis intelijen sangat penting untuk menentukan apa yang dianggap penting dan etis dalam pengumpulan dan penggunaan informasi.

#### 5. Menghadapi Ketidakpastian Global

Dalam dunia yang semakin tidak pasti dan tidak teratur, negara perlu mengembangkan kapasitas intelijen yang lebih adaptif dan responsif. Mearsheimer<sup>68</sup> menyatakan bahwa intelijen diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dalam sistem internasional, dan rekonsepsi teori intelijen dapat membantu negara dalam melindungi dan memperluas keuntungan relatif mereka.

Secara keseluruhan, rekonsepsi definisi dan teori intelijen dalam keamanan nasional sangat penting untuk memastikan bahwa strategi intelijen tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, negara dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman yang ada.

## Rekonsepsi Definisi Intelijen

Intelijen, menurut definisi dasar dan umum, adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks

---

<sup>66</sup> Bernabé Aldeguer Cerdá and Joan Antón-Mellón, "Intelligence Theory and Democratic Governance: An Epistemological Approach from Political Science," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 38, no. 2 (2025): 383-403. doi:10.1080/08850607.2023.2299016

<sup>67</sup> Terry C. Quist, "What philosophy can do for intelligence," *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 777-790. doi:10.1080/02684527.2022.2076328

<sup>68</sup> John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (W. W. Norton, 2001).

keamanan nasional. Intelijen tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami ancaman, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara. Dalam hal ini, intelijen mencakup tiga konteks utama: kegiatan, organisasi, dan pengetahuan.

**Konteks Kegiatan:** dalam konteks kegiatan, intelijen didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi. Proses ini mencakup analisis mendalam untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Hasil dari proses ini disajikan kepada pengambil keputusan untuk mendukung tindakan preventif dan responsif terhadap ancaman yang mungkin dihadapi negara. Definisi ini sejalan dengan pandangan Scott dan Jackson<sup>69</sup> yang menekankan pentingnya proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi.

**Konteks Organisasi:** dalam konteks organisasi, intelijen berfungsi sebagai alat negara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mendeteksi, memberikan peringatan, dan mencegah ancaman terhadap keamanan nasional. Organisasi intelijen harus terstruktur dan memiliki proses yang sistematis untuk menghasilkan intelijen yang berkualitas. Hal ini mencerminkan pandangan Sherman Kent<sup>70</sup> yang menekankan pentingnya organisasi dalam menghasilkan intelijen yang efektif untuk pengambilan keputusan.

**Konteks Pengetahuan:** dalam konteks pengetahuan, intelijen adalah informasi yang telah dianalisis dan disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengambil keputusan. Informasi ini harus relevan, akurat, dan tepat waktu untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh para pemimpin dalam merumuskan kebijakan. Definisi ini sejalan dengan pandangan Kahn<sup>71</sup> yang menekankan pentingnya analisis dalam mengidentifikasi pola dan tren yang dapat mempengaruhi keputusan strategis.

Dengan demikian, berdasarkan berdasarkan analisis secara holistik dari berbagai literatur dan pandangan pakar, penelitian ini mengajukan definisi intelijen yang telah direkonsepsi sebagai berikut:

Intelijen merupakan suatu kegiatan multidisipliner berupa pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi (intelijen sebagai

---

<sup>69</sup> Len Scott and Peter Jackson, "The Study of Intelligence in Theory and Practice," *Intelligence and National Security*, 19, no. 2 (2004): 139-169. doi:10.1080/0268452042000302930

<sup>70</sup> Sherman Kent. *Strategic Intelligence for the Twenty-First Century*. (Washington, D.C.: National Defense University Press, 1966)

<sup>71</sup> David Kahn, "An Historical Theory of Intelligence," *Intelligence and National Security*, 16, no. 3 (2001): 79-92. doi:10.1080/02684520412331306220

kegiatan), yang dilakukan oleh organisasi intelijen negara secara kolaboratif dengan komunitas aktor yang lebih luas (intelijen sebagai organisasi), untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti demi mendukung pengambilan keputusan dalam mencegah dan menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional (intelijen sebagai produk pengetahuan)

Definisi di atas menggabungkan tiga konteks (kegiatan, organisasi, pengetahuan) ke dalam satu kesatuan utuh. Selain itu, frasa “komunitas aktor yang lebih luas” merefleksikan *konsep Expanded Intelligence Communities* (EIC) yaitu keterlibatan aktor di luar badan intelijen tradisional. Dengan demikian, komunitas intelijen diperluas mencakup agensi penegak hukum, dinas keamanan siber, lembaga akademik riset, pakar sektor swasta, bahkan masyarakat sipil ketika relevan. Sebagai contoh dalam menghadapi kejahatan siber, kerja sama antara intelijen negara dengan perusahaan teknologi dan tim respon insiden siber sangat diperlukan untuk berbagi indikator ancaman. Pendekatan EIC ini sejalan dengan praktik di beberapa negara maju, contohnya Inggris membentuk National Cyber Security Centre (NCSC) pada tahun 2017 yang untuk pertama kalinya menyatukan pemerintah, dinas intelijen, dan sektor swasta dalam satu organisasi keamanan siber terpadu. Hasilnya, pemahaman dan respons terhadap ancaman siber di Inggris menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Hal ini mendukung argumen bahwa kolaborasi lintas-aktor memperkuat intelijen dengan menutup celah keahlian dan informasi yang mungkin tidak dimiliki satu lembaga saja.

Penelitian ini juga menggarisbawahi definisi rekonsepsi yang menekankan intelijen sebagai kegiatan multidisipliner. Hal ini berarti bahwa metodologi ilmiah dan berbagai disiplin ilmu diintegrasikan dalam proses intelijen. Selama ini analisis intelijen kerap mengandalkan intuisi atau pengalaman analisis individual, yang rentan bias kognitif. Rekonsepsi ini mendorong penggunaan teknik analitis formal, misalnya analisis berbasis data besar dan pemodelan prediktif, serta metode kualitatif seperti analisis wacana untuk memahami narasi ideologis teroris. Penekanan pada metodologi ilmiah didukung oleh pandangan Aldeguer Cerdá & Antón-Mellón<sup>72</sup> bahwa tanpa pemahaman teknik ilmu sosial yang tepat, analisis dapat keliru dalam penafsiran data. Oleh karena itu, intelijen modern harus mengadopsi disiplin ilmiah

---

<sup>72</sup> Bernabé Aldeguer Cerdá and Joan Antón-Mellón, “Intelligence Theory and Democratic Governance: An Epistemological Approach from Political Science,” *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 38, no. 2 (2025): 383-403. doi:10.1080/08850607.2023.2299016

agar produknya akurat dan tidak sekadar bergantung intuisi. Sebagai contoh, penggunaan analitik prediktif telah membantu intelijen finansial mendeteksi pola pendanaan teroris, dan penggunaan kecerdasan buatan mampu memproses data siber dalam skala besar untuk mengidentifikasi serangan secara *real-time*.

Terkait landasan filosofis, rekonsepsi ini menyiratkan bahwa intelijen juga dibingkai oleh nilai-nilai normatif. Intelijen yang “diperluas” berarti keterbukaan untuk diawasi dan diimbangi oleh perspektif luar, termasuk pertimbangan etika dan hak asasi manusia. Filosofi seperti *Just Intelligence* memberikan pedoman bahwa operasi intelijen harus mematuhi proporsionalitas dan kebutuhan etis, misalnya meminimalkan pelanggaran privasi warga kecuali benar-benar diperlukan demi mencegah ancaman serius. Integrasi filsafat juga mendorong adanya refleksi kritis internal dalam komunitas intelijen – semacam *Red Team* yang mengevaluasi bias/assumption. Dengan demikian, intelijen tidak lagi berjalan dalam isolasi kognitif yang bisa menghasilkan groupthink. Upaya “menghubungkan titik-titik” yang gagal pada kasus 9/11 dan serangan Hamas 2023 sebagian disebabkan *mindset* sempit dan bias institusional. Rekonsepsi definisi intelijen ini, dengan spirit multidisipliner dan multi-aktor, berpotensi mengurangi bias tersebut. Analisis intelijen yang bekerja bersama pakar eksternal atau disiplin lain lebih mungkin menangkap perspektif berbeda, sehingga indikator ancaman tidak diabaikan. Contohnya, sebelum serangan 7 Oktober 2023, terdapat data terbuka tentang latihan paragliding Hamas yang luput diinterpretasi sebagai ancaman. Kolaborasi erat intelijen militer dengan komunitas Open Source Intelligence (OSINT) atau akademisi kawasan mungkin dapat memberi *second opinion* bahwa latihan tersebut berbahaya.

Secara praktis, rekonsepsi definisi intelijen ini menuntun perubahan pada praktik intelijen nasional. Intelijen harus dilihat sebagai ekosistem pengetahuan nasional, bukan sekedar “agen rahasia” yang bekerja tertutup. Konsekuensinya, diperlukan platform koordinasi dan berbagi informasi lintas instansi. Pasca kegagalan intelijen 9/11, AS membentuk Office of the Director of National Intelligence (ODNI) sebagai koordinator 17 badan intelijennya. Hal tersebut merupakan contoh upaya internal memperluas komunitas intelijen secara terstruktur. Ke depan, konsep EIC mendorong forum yang lebih luas lagi – misalnya Pusat Fusion Intelijen tempat data dari dinas intelijen, kepolisian, imigrasi, siber, digabungkan dan dianalisis bersama. Di Indonesia sendiri, penerapan intelijen yang inklusif dapat berupa melibatkan akademisi dalam penyusunan *National*

*Risk Assessment*, atau menggandeng perusahaan telekomunikasi untuk deteksi *cyber attack*.

## Rekonsepsi Teori Intelijen

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, usulan rekonsepsi teori intelijen dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam konteks keamanan nasional saat ini. Berikut adalah usulan rekonsepsi teori intelijen yang lebih komprehensif dan adaptif:

### 1) Pendekatan Multidimensional

Teori intelijen harus diakui sebagai bidang yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup berbagai aspek seperti pengumpulan informasi, analisis, penyajian, dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini harus mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, psikologi, dan filsafat, untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang intelijen. Hal ini sejalan dengan pandangan Gaspard dan Pili<sup>73</sup> yang menekankan pentingnya integrasi filsafat dalam studi intelijen untuk memperkaya eksplorasi konseptual.

### 2) Fokus pada Kejutan dan Ketidakpastian

Teori intelijen harus mengakui hubungan erat antara intelijen dan teori kejutan. Kejutan dapat berfungsi sebagai pengganda kekuatan dalam strategi militer, tetapi juga membawa risiko. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat membantu negara dalam memanfaatkan kejutan secara strategis sambil meminimalkan risiko yang terkait. Ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana intelijen dapat memberikan peringatan dini dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, seperti yang diungkapkan oleh Mearsheimer dan Phythian.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Jules J. S. Gaspard and Giangiuseppe Pili, "Integrating intelligence theory with philosophy: introduction to the special issue," *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 763-776. doi:10.1080/02684527.2022.2076327

<sup>74</sup> John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (W. W. Norton, 2001). See also Mark Phythian, "Intelligence Theory and Theories of International Relations: Shared World or Separate Worlds?" in *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phythian, (Routledge, 2009), 54-73.

### 3) Analisis Kegagalan Intelijen

Teori intelijen harus mencakup analisis mendalam tentang kegagalan intelijen, yang sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin, bukan hanya kelemahan dalam sistem pengumpulan informasi. Richard Betts<sup>75</sup> menunjukkan bahwa pemahaman konteks dan keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan sangat penting. Oleh karena itu, teori intelijen harus mencakup elemen evaluasi dan pembelajaran dari kegagalan untuk meningkatkan efektivitas di masa depan.

### 4) Penerapan Pemikiran Normatif

Teori intelijen harus mengintegrasikan pemikiran normatif yang mempertimbangkan etika dan moralitas dalam analisis intelijen. Terry C. Quist (2022) menekankan pentingnya norma-norma dalam membantu profesional intelijen menentukan apa yang penting dan apa yang tidak. Dengan demikian, teori intelijen harus mencakup panduan etis yang jelas untuk pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi, serta mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil.

### 5) Paradigma Baru, Komunitas Intelijen yang Diperluas

Teori intelijen harus mengadopsi paradigma baru yang lebih proaktif dan kolaboratif, seperti yang diusulkan oleh Aldeguer Cerdá dan Antón-Mellón (2025). Konsep Expanded Intelligence Communities (EIC) harus diintegrasikan untuk melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, dalam proses analisis intelijen. Pendekatan ini akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan modern seperti terorisme dan cybercrime.

### 6) Metodologi Ilmiah dalam Analisis

Teori intelijen harus menekankan pentingnya metodologi ilmiah dalam analisis intelijen. Penggunaan teknik analisis yang tepat, baik kualitatif maupun kuantitatif, sangat penting untuk menghasilkan intelijen yang akurat dan relevan. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi analis intelijen untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan metodologi yang sesuai dalam praktik mereka.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Richard K. Betts, "Analysis, War, and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable," *World Politics*, 31, no. 1 (1978): 61-89.

<sup>76</sup> Bernabé Aldeguer Cerdá and Joan Antón-Mellón, "Intelligence Theory and Democratic Governance: An Epistemological Approach from Political Science," *International*

Namun demikian, mengaplikasikan rekonsepsi ini tidak luput dari tantangan. Resistensi institusional mungkin muncul karena kultur birokrasi intelijen cenderung tertutup dan hierarkis. Badan intelijen konvensional bisa merasa enggan berbagi informasi dengan pihak luar (kebocoran data, kehilangan kendali). Contohnya, sebelum serangan Hamas 2023, intel Israel diketahui menerima informasi rencana serangan jauh hari namun mengabaikannya sebagai ancaman serius. Salah satu alasannya, mungkin karena informasi tersebut datang dari sumber yang dianggap kurang kredibel (atau berbeda pandangan dengan intel mainstream) sehingga di-*dismiss*. Butuh perubahan budaya kepercayaan dan mindset agar komunitas intelijen mau terbuka menerima input eksternal. Kedua, terdapat kendala sumber daya dan kapabilitas. Mengolah big data atau intelijen siber membutuhkan investasi teknologi dan SDM ahli. Tidak semua negara atau instansi siap dengan infrastruktur analitik canggih atau ahli data science. Tanpa dukungan ini, penerapan metodologi ilmiah dalam intelijen bisa tersendat. Ketiga, ada potensi isu hukum dan etika. Melibatkan aktor non-pemerintah dalam intelijen menimbulkan pertanyaan tentang batas tanggung jawab dan kerahasiaan. Perlu ada payung hukum jelas misalnya dalam berbagi data antara intelijen dengan sektor swasta, agar kerjasama tidak melanggar privasi warga atau aturan perundangan.

Lebih lanjut, tantangan-tantangan tersebut bukan alasan untuk tidak bergerak ke arah perubahan. Justru, dengan mengenali hambatan, kita bisa merumuskan mitigasi dalam rekomendasi. Misalnya, resistensi birokrasi dapat diatasi dengan reformasi kelembagaan bertahap – membentuk satuan gabungan atau pusat fusi intelijen di mana personel lintas lembaga bekerja bersama, sehingga tercipta budaya kolaboratif. Keterbatasan sumber daya bisa diatasi dengan aliansi internasional atau regional saling berbagi kemampuan seperti kerja sama intelijen siber ASEAN, atau dukungan teknis dari negara mitra). Aspek legal bisa diperkuat dengan membuat protokol pertukaran informasi yang mengatur apa yang boleh dibagi ke sektor mana, sambil menjaga akuntabilitas (parlemen atau badan pengawas independen mengawasi praktik EIC agar tetap sesuai etika).

## Penerapan Rekonsepsi Teori Intelijen Berbasis Studi Kasus

Pemahaman kerangka rekonsepsi teori intelijen secara holistik dapat dilakukan dengan menganalisis sejumlah studi kasus yang telah dipilih melalui proses kurasi berdasarkan relevansi dengan definisi, sebagai berikut:

### a. Polemik Intelijen Terorisme dalam Kasus 9/11 Amerika Serikat (AS)

Sebelum tahun 2001, komunitas intelijen AS sangat terfragmentasi (FBI fokus domestik, CIA fokus eksternal) dan kurang berbagi informasi. Teror 9/11 terjadi antara lain karena gagalnya koordinasi intelijen, meski tanda-tanda adanya rencana serangan telah muncul (beberapa pelaku sudah terdeteksi agen imigrasi, laporan pandora mengenai latihan penerbangan mencurigakan). Dengan kerangka EIC, seharusnya intelijen kontra-teror melibatkan kolaborasi erat antara dinas intelijen, penegak hukum, otoritas penerbangan, hingga komunitas muslim setempat (untuk deteksi radikalisasi). Usaha kearah itu baru digalakkan setelah 9/11, misalnya dengan pembentukan Joint Terrorism Task Force (JTTF) yang menyatukan FBI dengan polisi lokal, serta National Counterterrorism Center (NCTC) yang mengintegrasikan info lintas lembaga. Rekonsepsi intelijen mendukung langkah-langkah tersebut dan mendorong lebih jauh: misalnya, sharing intelijen lintas negara sekutu, atau mengundang pakar akademik tentang terorisme dalam merumuskan strategi kontra-radikalisasi. Kegagalan 9/11 juga menunjukkan perlunya metode analisis baru - Komisi 9/11 menyebut intelijen AS waktu itu masih berfokus pada ancaman konvensional Perang Dingin. Dengan metodologi foresight ilmiah, analisis mestinya melakukan scenario analysis terhadap skenario serangan non-konvensional (seperti menggunakan pesawat sebagai senjata) yang saat itu diabaikan karena dianggap "tak terbayangkan". Hal ini menggarisbawahi pentingnya *out-of-the-box thinking* yang difasilitasi melalui pendekatan multidisiplin.

### b. Perkembangan Intelijen Siber dan Pembentukan NCSC Inggris

Inggris tercatat pernah menghadapi lonjakan serangan siber dari aktor negara (contoh: peretasan infrastruktur oleh Rusia) maupun kriminal. Intelijen tradisional (SIGINT oleh GCHQ) awalnya berfokus pada penyadapan komunikasi, namun dalam menghadapi serangan siber luas, dibutuhkan keterlibatan tim respons insiden,

pakar teknis dari perusahaan, dan edukasi pengguna. National Cyber Security Centre (NCSC) dibentuk tahun 2016 sebagai bagian dari GCHQ, tetapi dengan mandat merangkul sektor privat dan publik dalam satu atap. Ini implementasi nyata konsep expanded intelligence community di domain siber. Melalui NCSC, intelijen teknis pemerintah dipadukan dengan pengetahuan industri (misal info kerentanan software dari perusahaan) sehingga respon terhadap ancaman siber lebih cepat. Pusat ini juga melakukan fungsi edukasi ke masyarakat (publikasi panduan keamanan siber), suatu hal yang sebelumnya tidak lazim dilakukan dinas intelijen yang cenderung tertutup. Hasilnya, sejumlah serangan siber besar berhasil ditanggulangi atau dampaknya diminimalisir karena ada peringatan dini terpadu. Contoh, saat muncul ancaman ransomware global (WannaCry 2017), NCSC segera berkoordinasi dengan NHS (layanan kesehatan) dan provider internet untuk memitigasi penyebaran malware. Dari studi kasus ini, dapat dilihat bahwa intelijen yang dikonsepsi ulang mampu beradaptasi dengan jenis ancaman baru - di mana kolaborasi lintas aktor dan pengetahuan ilmiah (keahlian teknis) menjadi kunci keberhasilan.

### Integrasi dan Operasionalisasi Rekonsepsi Teori Intelijen

Secara keseluruhan, pembahasan dan kajian penelitian di atas menunjukkan bahwa rekonsepsi definisi dan teori intelijen yang ditawarkan tidak hanya bersifat ideal teoritis, tetapi dapat dioperasionalkan dalam konteks nyata. Penerapannya mampu menjawab berbagai jenis ancaman secara lebih adaptif. Tabel berikut merangkum perbedaan kunci antara pendekatan intelijen tradisional dan pendekatan rekonsepsi yang diusulkan:

Aspek	Pendekatan Intelijen Tradisional	Pendekatan Rekonseptual Teori Intelijen
Lingkup ancaman	Fokus pada ancaman negara (militer, spionase antarnegara).	Mencakup ancaman non-negara: terorisme, siber, kriminal transnasional,
Aktor & kolaborasi	Terbatas pada dinas intelijen pemerintah; informasi tersilo.	Komunitas intelijen diperluas (EIC): kolaborasi lintas lembaga, swasta, akademisi; <i>information sharing</i> aktif

Metode analisis	Bertumpu pada intelijen rahasia, analisis tradisional (manual).	Integrasi metodologi ilmiah: analisis data besar, AI, pendekatan multidisiplin (sosial-teknis).
Landasan etis/filosofis	Implied (tersirat), sering mengedepankan kerahasiaan di atas segalanya.	Eksplisit: mengadopsi kerangka normatif (mis. etika intelijen JIT), transparansi relatif lebih tinggi, akuntabilitas publik lebih diperhatikan.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rekonsepsi intelijen membawa perubahan paradigma: dari yang sempit menjadi luas, tertutup menjadi kolaboratif, reaktif menjadi ilmiah-proaktif, dan ambigu secara etis menjadi lebih berlandaskan norma.

## Penutup

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik intelijen dengan menawarkan kerangka rekonsepsi yang lebih holistik. Secara teoritis, kajian ini menyatukan berbagai benang pemikiran intelijen (aktivitas, organisasi, pengetahuan) menjadi definisi dan model terpadu. Upaya ini menjawab seruan para ahli yang menginginkan definisi intelijen yang lebih jelas demi kemajuan disiplin intelijen. Dengan definisi yang multidimensional, diharapkan studi intelijen sebagai disiplin akademik memperoleh objek kajian yang lebih terstruktur, sehingga mempermudah pengembangan teori lebih lanjut. Konsep *Expanded Intelligence Communities* (EIC) yang diangkat juga memperluas horizon teori intelijen ke arah interdisipliner, mendekatkan studi intelijen dengan bidang hubungan internasional, studi keamanan, ilmu data, dan filsafat. Ini adalah kontribusi ilmiah penting karena memperkaya khazanah intelijen melampaui pendekatan tradisional. Selain itu, integrasi perspektif filsafat normatif memberikan landasan moral bagi teori intelijen yang selama ini dianggap *value-neutral*. Penulis menegaskan bahwa intelijen nasional hakikatnya merupakan aktivitas epistemik yang memiliki implikasi etis, sehingga perlu teori yang mencakup pedoman moral dan bukan sekadar efektifitas instrumental semata.

Ditinjau dari sisi praktis, rekonsepsi ini menawarkan jalan keluar konkrit bagi beberapa kelemahan dalam praktik intelijen saat ini. Pertama, definisi dan teori yang baru dapat menutup celah-celah dalam

praktik intelijen konvensional. Sebagai contoh, telah diidentifikasi bahwa intelijen tradisional kerap gagal menghadapi ancaman siber karena kurang menggandeng ahli teknis luar; konsep EIC langsung menjawab hal ini dengan merekomendasikan keterlibatan multi-aktor. Begitu pula, kegagalan intelijen dalam kasus-kasus serangan mendadak (*surprise attack*) seringkali bersumber dari bias dan kurangnya perspektif alternatif. Kerangka baru mendorong praktik cross-check antar disiplin dan aktor, sehingga analisis lebih obyektif. Kedua, rekonsepsi ini memberikan arah bagi reformasi institusional intelijen. Dengan mengetahui bahwa model idealnya bersifat kolaboratif dan ilmiah, pemerintah dapat merancang struktur intelijen yang mendorong hal tersebut – misalnya membangun pusat analisis terpadu, meningkatkan kapasitas teknologi informasi intelijen, serta membentuk mekanisme berbagi informasi lintas instansi secara rutin. Ketiga, teori ini relevan langsung terhadap isu keamanan nyata: intelijen yang diperluas dan adaptif akan lebih siap menghadapi terorisme jaringan, spionase siber oleh musuh negara, proliferasi senjata, hingga tantangan hybrid warfare yang menggabungkan ancaman militer dan non-militer.

Lebih lanjut, definisi dan teori intelijen yang direkonsepsi melalui pendekatan multidimensional, integratif, dan ilmiah dapat menjadi fondasi bagi intelijen nasional yang lebih tangguh. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan menawarkan konsep yang dapat diimplementasikan dan diuji. Meskipun tidak dapat menjamin semua kegagalan intelijen dapat secara seutuhnya dieliminasi, kerangka ini secara jelas mengatasi banyak kelemahan yang melekat pada paradigma lama, seperti silo informasi, bias analitik, dan keterbatasan jangkauan ancaman.

## Referensi

- Adewunmi Falode. "Found: A Definition of Intelligence". *Journal of Social Sciences IV*, no. 1 (March 2021): 70.
- Aldeguer Cerdá, Bernabé and Joan Antón-Mellón. "Intelligence Theory and Democratic Governance: An Epistemological Approach from Political Science." *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 38, no. 2 (2025): 383-403. doi:10.1080/08850607.2023.2299016
- Betts, Richard K. "Analysis, War, and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable." *World Politics*, 31, no. 1 (1978): 61-89

- Breakspear, Alan. "A New Definition of Intelligence." *Intelligence and National Security*, (2012): 1-16. doi:10.1080/02684527.2012.699285
- Gaspard, Jules J. S. and Giangiuseppe Pili. "Integrating intelligence theory with philosophy: introduction to the special issue." *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 763-776. doi:10.1080/02684527.2022.2076327
- Handel, Michael. "Intelligence and the Problem of Strategic Surprise." *The Journal of Strategic Studies*, 7, no. 3 (1984): 229-230.
- Kahn, David. "An Historical Theory of Intelligence." *Intelligence and National Security*, 16, no. 3 (2001): 79-92. doi:10.1080/02684520412331306220
- Kent, Sherman. *Strategic Intelligence for American World Policy*. Princeton University Press, 1949.
- Kent, Sherman. *Strategic Intelligence for the Twenty-First Century*. Washington, D.C.: National Defense University Press, 1966.
- Laqueur, Walter. *The Age of Terrorism*. Boston: Little, Brown and Company, 1985.
- Mearsheimer, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton, 2001.
- Marrin, Stephen. "Intelligence Analysis Theory: Explaining and Predicting Analytic Responsibilities." *Intelligence and National Security*, 22, no. 6 (2007): 821-846. doi:10.1080/02684520701770634
- Miller, Seumas. "Rethinking the Just Intelligence Theory of National Security Intelligence Collection and Analysis: The Principles of Discrimination, Necessity, Proportionality and Reciprocity." *Social Epistemology*, 35, no. 3 (2021): 211-231. doi:10.1080/02691728.2020.1855484
- Miller, Seumas. "National Security Intelligence Activity and the Just Intelligence Theory." *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* (2024). doi:10.1080/08850607.2024.2374227
- Phythian, Mark. "Intelligence Theory and Theories of International Relations: Shared World or Separate Worlds?" In *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, edited by Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phythian, 54-73, Routledge, 2009.
- Pili, Giangiuseppe. "Toward a Philosophical Definition of Intelligence." *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, 21, no. 2 (2019): 162-190. doi:10.1080/23800992.2019.1649113

- Prunckun, Hank. *Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*. Rowman & Littlefield, 2014.
- Rogg 'Jeffrey P. "Quo Vadis?' A comparatist meets a theorist searching for a grand theory of intelligence." *Intelligence and National Security*, 33, no.4 (2018): 541-552. doi: 10.1080/02684527.2018.1452575
- Quist, Terry C. "What philosophy can do for intelligence." *Intelligence and National Security*, 37, no. 6 (2022): 777-790. doi:10.1080/02684527.2022.2076328
- Scott, Len and Peter Jackson. "The Study of Intelligence in Theory and Practice." *Intelligence and National Security*, 19, no. 2 (2004): 139-169. doi:10.1080/0268452042000302930
- Troy, Thomas F. "The "Correct" Definition of Intelligence." *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 5, no. 4 (1991): 433-454. doi:10.1080/08850609108435193
- U.S. Intelligence Community. Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community. Washington, DC: Office of the Director of National Intelligence, 2025. <https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2025/4058-2025-annual-threat-assessment>
- Wirtz, James J. "Theory of Surprise," in *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, edited by Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phythian, 73-86, Routledge, 2009.
- Walsh, Patrick. *Intelligence and Intelligence Analysis*. Routledge, 2011.